



FRAKSI PKB
DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
DPRD KOTA SALATIGA
terhadap:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Salatiga Tahun 2025–2055

Salatiga, 25 Mei 2026



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KOTA SALATIGA

Jl. Letjend. Sukowati No. 51, Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50724 /
089536667111

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

- **Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kota Salatiga,**
- **Yang kami hormati Wali Kota Salatiga beserta jajaran Pemerintah & Forkopimda Kota Salatiga,**
- **serta yang kami hormati segenap anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian kepada masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Salatiga atas penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah yang sangat strategis bagi arah pembangunan Kota Salatiga ke depan. Fraksi PKB memandang bahwa ketiga Raperda ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan teknokratis, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

1. PANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Fraksi PKB memahami bahwa sektor transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa Kota Salatiga menghadapi persoalan meningkatnya kepadatan lalu lintas, belum optimalnya angkutan umum, tingginya potensi kecelakaan, serta dampak pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

Fraksi PKB menilai bahwa Raperda ini sangat penting, namun perlu benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar pendekatan administratif semata.

Oleh karena itu, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan penting :

- (1) Pemerintah Kota harus serius menangani kemacetan di titik-titik strategis Kota Salatiga, terutama kawasan perdagangan, pendidikan, dan jalur nasional Semarang–Solo yang selama ini menjadi titik kepadatan kendaraan.
- (2) Fraksi PKB mendorong agar pengembangan transportasi publik tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang murah, aman, nyaman, dan terjangkau masyarakat kecil.
- (3) Penataan parkir harus dilakukan secara tertib dan profesional. Selama ini persoalan parkir liar masih menjadi keluhan masyarakat dan sering memicu kemacetan.
- (4) Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, khususnya bagi pelajar, pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pengendara roda dua.
- (5) Pemerintah Kota juga perlu mengantisipasi perkembangan transportasi berbasis digital agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun ketimpangan ekonomi di masyarakat.
- (6) Fraksi PKB menekankan bahwa wajah lalu lintas sebuah kota mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahannya. Karena itu, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus berbasis pelayanan publik, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

2. PANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Fraksi PKB memandang bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa pengelolaan aset daerah sangat menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.

Namun demikian, Fraksi PKB melihat masih terdapat berbagai persoalan pengelolaan aset daerah yang harus menjadi perhatian serius, antara lain ketidaktertiban administrasi aset, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset daerah.

Untuk itu Fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan:

1. Pemerintah Kota harus melakukan pendataan dan inventarisasi aset daerah secara menyeluruh, transparan, dan berbasis digital agar tidak terjadi aset yang tidak jelas status maupun pemanfaatannya.
2. Pemanfaatan aset daerah harus benar-benar memberikan nilai manfaat ekonomi bagi daerah dan pelayanan bagi masyarakat, bukan justru menjadi aset tidur yang membebani APBD.
3. Fraksi PKB meminta adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan, pemindahtanganan, maupun kerja sama pemanfaatan aset daerah agar tidak menimbulkan potensi kerugian daerah.
4. Pemerintah Kota harus menjamin bahwa pengelolaan barang milik daerah bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
5. Fraksi PKB juga mendorong agar aset daerah yang strategis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM, pelayanan sosial, pendidikan, dan kepentingan publik lainnya.
6. Fraksi PKB menilai bahwa aset daerah sejatinya adalah kekayaan rakyat yang harus dijaga dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

3. PANDANGAN UMUM TERHADAP RAPERDA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KOTA SALATIGA TAHUN 2025–2055

Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap Raperda RPPLH karena menyangkut masa depan lingkungan hidup Kota Salatiga dalam jangka panjang.

Dalam Naskah Akademik disebutkan bahwa perkembangan Kota Salatiga sebagai kawasan perdagangan, jasa, pendidikan, dan pertumbuhan perkotaan telah memberikan tekanan serius terhadap lingkungan hidup, seperti peningkatan volume sampah, pencemaran air, alih fungsi lahan, serta berkurangnya ruang terbuka hijau.

Fraksi PKB berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa depan.

Beberapa catatan penting Fraksi PKB terhadap Raperda ini adalah:

- 1) Pemerintah Kota harus memiliki keberanian dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama terhadap kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau.
- 2) Persoalan sampah harus menjadi agenda prioritas. Data dalam Naskah Akademik menunjukkan volume sampah Kota Salatiga masih sangat tinggi dan belum seluruhnya tertangani secara optimal.
- 3) Fraksi PKB meminta adanya penguatan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan pembangunan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 4) Pemerintah Kota harus memperkuat edukasi lingkungan kepada masyarakat, termasuk budaya pengurangan sampah plastik, pengelolaan limbah rumah tangga, dan pelestarian sumber air.
- 5) Fraksi PKB juga mendorong agar RPPLH tidak hanya menjadi dokumen formal jangka panjang, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah yang terintegrasi dengan RPJPD dan RPJMD Kota Salatiga.
- 6) Dalam pelaksanaannya nanti, Fraksi PKB meminta adanya keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan generasi muda dalam pengawasan kebijakan lingkungan hidup.
- 7) Fraksi PKB mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang dibiarkan hari ini akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Karena itu, pembangunan Kota Salatiga harus tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

PENUTUP

Pada prinsipnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga dapat menerima dan mendukung ketiga Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan berbagai catatan, masukan, dan penyempurnaan sebagaimana yang telah kami sampaikan.

Fraksi PKB berharap seluruh proses pembahasan dilakukan secara serius, terbuka, partisipatif, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Salatiga.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga ini kami sampaikan.

***Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthorik
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Salatiga, 25 Mei 2026

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Ketua : **Ahmad Musadad**

Wk. Ketua : **H. Basirin**

Sekretaris : **Eko Purnomo**

Anggota : 1. **Saiful Mashud, S.Sos.I**

2. **M. Miftah, SE**



(Handwritten signatures of Ahmad Musadad, H. Basirin, Eko Purnomo, Saiful Mashud, and M. Miftah)